



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERY SUHARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **445831**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.485.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m²/200 m² di TEGAL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 264 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 310 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 6650 m² di TEGAL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 8304 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 405 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah Seluas 450 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
8. Tanah Seluas 400 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 2707 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 360 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 3430 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
12. Tanah Seluas 400 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 311.330.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.900.030.000
III. HUTANG	Rp.	1.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.900.030.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.